



PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

**RENCANA KERJA
(RENJA)**



2025





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jalan APT. Pranoto No.85 RT.III Kelurahan Sukarame Telp. 0541-662053 Fax. 0541-662053
Website : distransnaker.kukarkab.go.id E-mail : distransnaker@kukarkab.go.id Tenggarong Kode Pos 75515

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : P-331/DISTRANSNAKER/050.4/3/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD ;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2025 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja .
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja 2025 Dan Rencana Kerja Perubahan 2024 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Pertama : Tim Penyusun Rencana Kerja 2025 dan Rencana Kerja Perubahan 2024 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas :

1. Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara ;
2. Merumuskan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun;
3. Melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
4. Melakukan Pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
5. Melakukan Pengkajian evaluasi Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
6. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
10. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan

sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Organisasi Perangkat Daerah;

11. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan OPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;

Kedua : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja 2025 dan Rencana Kerja Perubahan 2024 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila di pandang perlu.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal, Maret 2024

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Plt. Kepala Dinas



M. HATTA, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670815 200012 1 005

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai laporan;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kartanegara;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Nomor : P-331 /DISTRANSNAKER/050.4/3/2024
Tanggal : 20 Maret 2024

TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA 2025 DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	NAMA / NIP	JABATAN
I.	-	Pengarah
II.	M. Hatta, SE. M.Si NIP. 19670815 200012 1 005	Ketua
III.	Roni Nurhabibi, SE, M.Si NIP. 19800330 200112 1 001	Sekretaris
1.	Mariani, S.Sos NIP. 19710124 199301 2 004	Koordinator Sekretariat
2.	Hj. Ernawati, SE NIP. 19670717 199903 2 003	Anggota
3.	Mokhamad Zaenal Fanani, S. Sos NIP. 19720801 200901 1 003	Anggota
4.	Armada NIP. 19790902 200701 1 007	Anggota
5.	Sri Minarti Ningsih NIP. 19740731 201001 2 005	Anggota
6.	Sukri Rijal, SE NIP. 19730402 200012 1 002	Anggota
IV.	Suharningsih, SH., MM NIP. 19690108 199403 2 005	Koordinator Bidang Hubungan Industrial
1.	Desak Nyoman Ardaningsih, SH, MH NIP. 19740515 200112 2 003	Anggota
2.	Firman Hidayat, S.Sos NIP. 19750604 200701 1 029	Anggota
3.	Hidayat NIP. 19860112 200604 1 006	Anggota
V.	Lukman S.Sos., M.Si NIP. 19720516 200801 1 016	Koordinator Bidang Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.	Munarto, SP NIP. 19671203 199903 1 001	Anggota
2.	Aspian Noor NIP. 19860721 201001 1 007	Anggota

NO.	NAMA / NIP	JABATAN
3.	Urib Tri Widodo, SE NIP. 19810313 201001 1 005	Anggota
4.	Deviansyah NIP. 19780817 199803 1 006	Anggota
VI.	Drs. Saiful Bahri, M.H NIP. 19671006 200012 1 002	Koordinator Bidang Transmigrasi
1.	Drs. Lesta Nugroho NIP. 19670505 199403 1 014	Anggota
2.	Sri Plahesti, S.Pd NIP. 19671001 199303 2 007	Anggota
3.	Helda Royani NIP. 19781215 200701 2 009	Anggota
4	Yudha Dharma Taufik, S.Si Nip.19861022 201101 1 002	Anggota
VII.	Hj. Syarifah Rositah, ST, MT NIP. 19721028 200112 2 001	Koordinator Bidang Bidang Perencanaan dan Penempatan Kerja
1.	Herwin Setiawan, S.Sos NIP. 19780505 200801 1 029	Anggota
2.	Lisnawati, A.Md NIP. 19760501 200502 2 002	Anggota
3.	Yudha Dharma Taufik, S.Si Nip.19861022 201101 1 002	Anggota
4.	Herdani Ahdyawati, S.Sos NIP. 19730223 201001 2 003	Anggota

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Plt. Kepala Dinas



M. HATTA, S.E., M.Si.
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19670815 200012 1 005



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Karunia Nya penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Dengan tersusunnya penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan rangka mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia. Visi tersebut perlu ditindak lanjuti dengan sungguh-sungguh oleh semua OPD sebagai kebijakan implementatif, termasuk didalamnya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, yang kemudian dirumuskan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dinas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Penyusunan RENJA dinas ini mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Didalam dokumen ini merumuskan serta menterjemahkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten kedalam Rencana Kerja Distransnaker Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 disusun untuk dapat dipedomani bagi seluruh jajaran Pejabat beserta Staf di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan pembangunan urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas,


M. HATTA, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670815 200012 1 005



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3. Isu-isu Penting Pemyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	26
2.3.1 Permasalahan dan Hambatan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi.....	26
2.3.2 Dampak Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah	27
2.3.3 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan OPD.....	27
2.3.3 Rekomendasi.....	28
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	45

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	50
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	50
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	51

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	54
4.1. Program dan Kegiatan.....	54
4.2. Faktor Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan	54
4.3. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan.....	54



BAB V

PENUTUP	69
5.1. Catatan Penting Pelaksanaan Program Kegiatan.....	69
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	70
5.3. Rencana Tindak Lanjut	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1 T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian RENSTRA PD s/d Tahun 2025
Tabel 1.1	Anggaran dan Realisasi Tahun 2023
Tabel 2 T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara
Tabel 3 T-C.31	Review Terhadap Rancangan RKPD 2025 Distransnaker Kabupaten Kutai Kartanegara
Tabel 4 T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara
Tabel 5 T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilaksanakan pembangunan di sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

- a. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing,
- b. Meningkatkan Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru;
- c. Meningkatkan hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis
- d. Meningkatkan Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru

guna memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi dan sebagai Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

Sebagai dokumen rencana tahunan organisasi perangkat daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendorong penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- b. Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dengan Perencanaan Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
- c. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kerja tahunan sebagai wujud dari kinerja OPD pada tahun 2025 yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis Rencana Kerja 2025 dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana



tertuang dalam peraturan pemerintah no. 86 tahun 2017 tentang tata cara rencana pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja daerah, yang antara lain :

- a. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berjalan;
- b. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
- c. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan Indikator Kinerja Hasil (outcome) indikator Kinerja Keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Berbagai upaya yang telah dan sedang dikembangkan untuk makin memperkuat peranan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pemerintah dan sumber daya lainnya yang semakin terbatas. Dengan dilatar belakangi keterbatasan sumber daya yang tersedia serta peluang dan tantangan yang harus dihadapi (Renja OPD) tahun 2025.

I.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai dasar hukum antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang erubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
26. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
27. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP 13/2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 163).
38. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara;
39. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
40. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi,tugas dan fungsi,serta tata kerja pangkat daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program OPD yang telah mengakomodir usulan hasil musrenbang dari tiap kecamatan Kab. Kutai Kartanegara sebagai suatu dokumen perencanaan. Rencana Kerja (RENJA) akan digunakan bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Transmigrasi dan



Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan standart ukuran capaian keberhasilan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi dan telah ditetapkan dalam Renstra PD dan RPJMD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada tahun 2025.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat antara lain : Telaah terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun depan (n).

BAB V PENUTUP

Bab Penutup menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2024. Pada tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 7 (Tujuh) program dan 45 (Empat Puluh Lima) Sub Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) sejumlah Rp 41.558.444.573 (empat puluh satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah). dalam pelaksanaan program tersebut dapat diselesaikan hampir seluruhnya dengan optimal. Secara detail pelaksanaan untuk program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sehingga terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran. Program ini terdiri 8 (delapan) kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Sub Bagian Program Keuangan, Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan serta Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Alokasi anggaran sebesar Rp 13.335.175.775 ,- dengan realisasi sebesar Rp 12.107.677.687,- atau sebesar 90,8 % dan sisa anggaran sebesar Rp 1.311.606.863,-.

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini merupakan salah satu penunjang program Dedikasi Bupati Kutai Kartanegara Kukar Siap Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 program penunjang ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta serta kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil ketiganya diampu oleh Bidang Pembinaan Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Pagu dari program ini adalah Rp. 12.833.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.014.647.880,- 93,6%. Adapun rincian sub kegiatan yang termasuk program ini adalah sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerjaberdasarkan Klaster Kompetensi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.982.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.530.278.980,- atau 96,2% Target 535 Orang, dengan capaian 535 Orang atau 100%
- b. Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga



Pelatihan Kerja dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi Rp. 0,- hal ini sebabkan karena banyaknya LPK yang tutup akibat covid dan isi DPA tidak dapat mengakomodir non PNS (salah dalam penyusunan alokasi).

- c. Sub Kegiatan pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 701.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 424.241.500,- atau 60,5%
- d. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan anggaran Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.211.200,- atau 58,4 %
- e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.916.200,- atau 61,8%.

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan setengah penganggur melalui perluasan kesempatan kerja diberbagai bidang usaha baik diperkotaan maupun dipedesaan, dengan sasaran memperluas kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha dalam menciptakan tenaga kerja mandiri serta tersedianya sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja daerah, yang di ampu oleh Bidang Pembinaan Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu, Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja serta 4 (empat) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.429.999.798,- Realisasi Rp. 5.955.689.920,-, atau 92,6 % . Adapun rincian sub kegiatan yang termasuk program ini adalah sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.0000,- realisasi Rp. 34.155.000,- atau 68,3%.
- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- realisasi Rp. 53.893.320,- atau 71,8%
- c. Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 5.964.999.798,- realisasi Rp. 5.561.083.900,- atau 93,2%
- d. Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja dengan pagu anggaran Rp. 340.000.000,- realisasi Rp. 306.557.700,- atau 90,1 %

4. Program Hubungan Industrial

Program Hubungan Industrial merupakan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dimana program ini diampu oleh Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pagu program ini adalah Rp. 7.834.869.000,- dengan serapan sebesar 99,1%. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan



Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:

- a. Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan dengan anggaran sebesar Rp. 215.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 196.920.631,- atau 91,5%
- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 179.340.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 152.040.000,- atau 84,7%
- c. Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.584.300,- atau 89,1%
- d. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.580.000,- atau 85,1%.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.450.400,- atau 94,9%
- f. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.516.000,- atau 95%
- g. Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.240.529.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.231.594.000,- atau 99,8%, sub Kegiatan ini merupakan salah satu program Bupati untuk membantu Masyarakat miskin dalam pembayaran premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada Masyarakat bukan penerima upah yantersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Target Belanja Distransnaker Kab. Kutai Kartanegara tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 1 T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

OPD : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja PD tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	73,00	Persen	79,29	71,30	81,80	115	71,50	233	3,19
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	5	5	5	100	3	13	87
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Dokumen	3	3	3	100	3	9	60
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah									
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83	Orang/ Bulan	14	14	14	100	73	101	122
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	1	4	4	100	1	6	120
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset daerah yang di pelihara									
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	1	1	1	100	1	3	60



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja PD tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara									
6	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi	1	Dokumen	0	1	1	100	1	2	200
7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	15	Dokumen	3	3	3	100	1	7	47
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10	Orang	5	5	3	60	5	13	130
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	73	Orang	55	73	0	0	83	138	189
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	35	Orang	8	35	18	51	40	66	189
11	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	146	Paket	0	146	146	100	0	146	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum									
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Paket	2	1	1	100	1	4	80
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	Paket	3	5	5	100	1	9	300
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5	Paket	0	3	3	100	1	4	80



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja PD tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Serta Rapat/Jumlah peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	5	Paket	1	1	1	100	1	3	60
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	20	Paket	8	3	3	100	4	15	75
17	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	10	Paket	0	4	2	50	2	4	40
18	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Laporan	12	12	12	100	1	25	
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	87	Laporan	24	87	87	100	57	168	193
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit BMD yang diadakan									
20	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	110	Unit	0	102	100	98	3	103	94
21	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	Unit	1	1	1	100	0	2	29
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan sarana pendukung gedung dan bangunan	199	Unit	199	1	1	100	0	200	101
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan									
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	12	12	12	100	12	36	300



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja PD tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
24	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	12	12	12	100	12	36	300
25	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Laporan	12	12	12	100	12	36	300
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	12	12	12	100	12	36	300
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset yang di pelihara									
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	24	Unit R2/R4	21	24	18	75	24	63	263
28	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tidak Berwujud	1	Paket	0	0	0	0	1	1	100
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6	Unit	1	1	1	100	1	3	50
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	22,43	Persen	15,38	18,59	22,90	123	20,50	59	262
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan									
30	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat	2082	Orang	348	535	535	100	507	1.390	67
31	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi	50	LPTKS	4	20	6	30	0	10	20



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja PD tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas									
32	Pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	70	Unit	0	65	65	100	0	65	93
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Tersedia									
33	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan kerja swasta yang dibina	15	Lembaga	11	15	15	100	15	41	273
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Produktif									
34	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Terlaksananya konsultasi produktivitas terhadap perusahaan kecil	25	UMKM	25	25	25	100	25	75	300
III	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	TERSEDIA NYA DATA RENCANA TENAGA KERJA DAERAH	100	Persen	100	100	100	100	100	300	3
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah data rencana tenaga kerja daerah									
35	Penyusunan sumber daya pelayanan antar kerja	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK mikro kabupaten/kota	15	Perusahaan	15	15	15	100	15	45	300
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN	10,37	Persen	8,02	8,39	13,75	164	10,37	32	3,10
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Antar Kerja									
36	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Tersedianya sumber daya pelayanan	35	Orang	13	0	0	0	30	43	123
37	Pelayanan antar Kerja	Jumlah data lowongan dan penempatan tenaga kerja	25	Kecamatan	18	0	0	0	25	43	172



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja PD tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
38	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Kesempatan Kerja	775	Orang	378	579	579	100	705	1.662	214
39	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	75	Orang	0	50	50	100	0	50	67
40	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	75	Orang	0	10	10	100	0	10	13
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Layanan Antar Kerja									
41	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja	5	Event	2	2	2	100	60	64	1.280
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE KASUSU PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TERFASILITASI	100	Persen	100	100	100	100	100	300	300
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Perjanjian Kerja yang dicatatkan Serta Perjanjian Kerja Bersama yang di Daftarkan									
42	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20	Perusahaan	20	20	20	100	10	50	250
43	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	20	Perusahaan	0	0	0	0	10	10	50
44	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan	6	Laporan	2	2	2	100	2	6	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja PD tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan									
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Perusahaan yang Melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan									
45	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	50	Perkara	15	15	15	100	15	45	90
46	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	405	Perkara	125	100	100	100	80	305	75
47	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6	Asosiasi	24	6	6	100	6	36	600
48	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	5	Lembaga	1	1	1	100	1	3	60
49	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	35.440	Orang	35.000	35.440	35.440	100	48.729	119.169	336



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja PD tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
VI	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	JUMLAH RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN DESA/KIMTRANS	4	Dokumen	2	2	1	50	2	5	125
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Rencana pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans									
50	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	5	Kawasan	1	1	1	100	1	3	60
51	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	5	Dokumen	1	1	1	100	1	3	60
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	JUMLAH KAWASAN DESA/KIMTRANS YANG DIKEMBANGKAN	3	Kawasan	2	2	2	100	1	5	167
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Desa/Kimtrans yang di Kembangkan									
52	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	50	Kepala Keluarga	21	30	30	100	40	91	182
53	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	15	Satuan Permukiman	1	1	1	100	15	17	113



Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Tahun 2023
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH			13.335.175.775,00	12.107.677.687,00	90,80
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah			250.000.000,00	196.610.312,00	78,64
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	150.000.000,00	117.372.360,00	78,25
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	100.000.000,00	79.237.952,00	79,24
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah			8.630.565.320,00	7.970.992.075,00	92,36
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.022	Orang/Bulan	8.480.565.320,00	7.832.121.675,00	92,35
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Dokumen	150.000.000,00	138.870.400,00	92,58
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset daerah yang di pelihara			82.200.000,00	69.390.000,00	84,42
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	82.200.000,00	69.390.000,00	84,42
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara			767.800.000,00	600.423.493,00	78,20
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	146	Paket	267.710.000,00	253.080.000,00	94,54



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Dokumen	100.000.000,00	68.375.595,00	68,38
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	105.000.000,00	58.151.696,00	55,38
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	73	Orang	50.000.000,00	44.000.982,00	88,00
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35	Orang	245.090.000,00	176.815.220,00	72,14
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum			754.700.000,00	660.780.152,00	87,56
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	29.700.000,00	28.680.000,00	96,57
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	125.000.000,00	120.754.100,00	96,60
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3	Paket	50.000.000,00	42.352.300,00	84,70
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000,00	20.107.900,00	40,22
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	50.000.000,00	43.467.100,00	86,93
16	Penyediaan Bahan/Materai	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	4	Paket	25.000.000,00	12.232.500,00	48,93
17	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	25.000.000,00	23.968.700,00	95,87
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	87	Laporan	400.000.000,00	369.217.552,00	92,30



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit BMD yang diadakan			1.247.359.000,00	1.238.380.000,00	99,28
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	102	Unit	1.247.359.000,00	1.238.380.000,00	99,28
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			1.126.509.524,00	983.442.521,00	87,30
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	4.000.000,00	3.992.000,00	99,80
21	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	270.000.000,00	196.876.204,00	72,92
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	umlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	69.867.000,00	59.400.000,00	85,02
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	782.642.524,00	723.174.317,00	92,40
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset yang di pelihara			476.041.931,00	387.659.134,00	81,43
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	Unit	276.041.931,00	190.484.134,00	69,01
25	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	200.000.000,00	197.175.000,00	98,59
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI			12.833.400.000,00	12.014.647.880,00	93,62
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan			12.733.400.000,00	11.954.520.480,00	93,88



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	535	Orang	12.733.400.000,00	11.954.520.480,00	93,88
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			50.000.000,00	29.211.200,00	58,42
27	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15	Lembaga	50.000.000,00	29.211.200,00	58,42
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas			50.000.000,00	30.916.200,00	61,83
28	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	25	Perusahaan	50.000.000,00	30.916.200,00	61,83
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	CAKUPAN LAYANAN DATA INFORMASI TENAGA KERJA di WILAYAH KECAMATAN			300.000.000,00	238.849.320,00	79,62
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah			300.000.000,00	238.849.320,00	79,62
29	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro kabupaten/kota	15	Perusahaan	300.000.000,00	238.849.320,00	79,62
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN			6.429.999.798,00	5.955.689.920,00	92,62
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Antar Kerja			6.089.999.798,00	5.649.132.220,00	92,76
30	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50	Orang	50.000.000,00	34.155.000,00	68,31
31	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	10	Orang	75.000.000,00	53.893.320,00	71,86
32	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	579	Orang	5.964.999.798,00	5.561.083.900,00	93,23



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Layanan Antar Kerja			340.000.000,00	306.557.700,00	90,16
33	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	140	Orang	340.000.000,00	306.557.700,00	90,16
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE KASUSU PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TERFASILITASI			7.834.869.000,00	7.762.685.331,00	99,08
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Perjanjian Kerja yang dicatatkan Serta Perjanjian Kerja Bersama yang di Daftarkan			394.340.000,00	348.960.631,00	88,49
34	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20	Perusahaan	215.000.000,00	196.920.631,00	91,59
35	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2	Laporan	179.340.000,00	152.040.000,00	84,78
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Perusahaan yang Melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan			7.440.529.000,00	7.413.724.700,00	99,64
36	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15	Perkara	50.000.000,00	44.584.300,00	89,17



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kabupaten/Kota						
37	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	100	Perkara	50.000.000,00	42.580.000,00	85,16
38	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6	Asosiasi	50.000.000,00	47.450.400,00	94,90
39	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga	50.000.000,00	47.516.000,00	95,03
40	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	35.440	Orang/Bulan	7.240.529.000,00	7.231.594.000,00	99,88
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans			525.000.000,00	398.958.940,00	75,99
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Rencana pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans			525.000.000,00	398.958.940,00	75,99
41	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigras	1	Kawasan	150.000.000,00	120.009.340,00	80,01
42	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1	Dokumen	375.000.000,00	278.949.600,00	74,39
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang di Kembangkan			300.000.000,00	262.669.102,00	87,56
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Desa/Kimtrans yang di Kembangkan			300.000.000,00	262.669.102,00	87,56



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	30	Kepala Keluarga (KK)	100.000.000,00	82.258.352,00	82,26
44	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1	Kawasan	200.000.000,00	180.410.750,00	90,21
JUMLAH					41.558.444.573,00	38.741.178.180,00	93,22

Berdasarkan tabel diatas Penyerapan Anggaran Belanja pada tahun 2023 sebesar 93,22% dari total Anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari Realisasi Anggaran dan Sasaran. Penyerapan Anggaran terbesar pada Program Hubungan Industrial sebesar 99,08%, Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 75,99% Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar 93,62%, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar 87,56% Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 90,80%, Program Perencanaan Tenaga Kerja sebesar 79,62% dan Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar 92,62%.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan di ikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi. Anggaran dan Realisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2023 terdapat penyerapan anggaran sebesar Rp. 38.741.178.180,- (93,22%) dari total pagu sebesar Rp. 41.558.444.573,-



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara adalah melaksanakan fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Distransnaker, maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai

tugas pokok :

“Membantu Bupati, melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja.”

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan **fungsi :**

1. Merumuskan kebijakan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Indikator Kinerja Utama (IKK) urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketransmigrasian .

Permendagri Nomor 73 tahun 2010 tentang indikator kinerja kunci (IKK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ditetapkan 3 indikator kunci, yaitu:

Urusan Ketenagakerjaan

Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi dengan rumusan pencari kerja yang dilatih dibagi dengan data awal renstra dikali 100.

1. Pencari kerja yang terdaftar ditempatkan dengan rumusan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar dikali 100.

Urusan Ketransmigrasian

1. Perencanaan Penyediaan Pencadangan Lahan Rencana Kawasan Transmigrasi dengan target 3 rencana Kawasan pengembangan.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja seperti pada Tabel 2 T-C.30 berikut :



Tabel 2 T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara
Sumber : RENSTRA 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (input) =(IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi	300 Orang (14,75)	300 Orang (18,59)	300 Orang (22,43)	300 Orang (26,27)	348 Orang (15,38)	554 Orang (22,9)	300 Orang (22,43)	300 Orang (26,27)	
2	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru		Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	6,41%	8,39%	10,37%	12,35 %	9,20%	13,75 %	37,60 %	12,35 %	
3	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis		Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	
4	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru		Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di rencanakan	2	0	1	1	2	1	1	1	
			Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di tetapkan	1	1	1	1	0	1	1	1	
			Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di Bangun	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di Kembangkan	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.		Predikat akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	71,30	71,50	73	75,30	79,29	81,80	73	75,30	



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Berbagai isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
3. Percepatan Transformasi ekonomi dan Pertumbuhan ekonomi yang eksklusif;
4. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan Ekseabilitas dan Konektivitas Infrastruktur;

Isu tersebut yang perlu mendapatkan perhatian pelaksanaan tugas fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja bila tidak ditangani dengan tepat dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara, dan terhadap capaian program nasional di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini terkait dengan capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD yang pelaksanaannya adalah oleh Perangkat Daerah sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi OPD:

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara pada dasarnya sudah bersinergi dengan Program/Kegiatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI juga dengan Program/Kegiatan Provinsi.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini adalah masih kurangnya sumber daya aparatur utamanya makin berkurang tenaga fungsional seperti pengantar kerja dan mediator serta masih belum adanya tenaga fungsional instruktur pelatihan. Disisi lain kebutuhan akan tenaga fungsional ini sangat mendesak untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang ada karena fungsi pegawai teknis ini tidak dapat tergantikan oleh PNS/ASN biasa. Selain hal tersebut diatas ada juga

Permasalahan yang dihadapi sebagai berikut ;

1. Belum Optimalnya koordinasi antara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Pengelola Data .
3. Belum tersedianya data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan
5. Penduduk usia kerja atau angkatan kerja Meningkat tidak diimbangi dengan peluang kerja;
6. Tingkat Pengangguran dan kemiskinan yang masih relatif tinggi sebagai dampak perubahan ekonomi dan kondisi lingkungan serta kesehatan masyarakat;



7. Rendahnya keterampilan/vokasi masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif
8. Masih rendahnya partisipasi Perusahaan dalam menyampaikan atau melaporkan penerimaan tenaga kerja dan lowongan kerja yang tersedia
9. Kurang keterkaitan antara kawasan pedesaan sebagai hinterland dengan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi;
10. Pembangunan dipedesaan relatif kurang berkembang yang diakibatkan masih minimnya infrastruktur (jalan, jembatan sarana dan prasarana)

Hambatan :

1. Lokasi yang tersebar di kab. Kutai Kartanegara.
2. Masih rendahnya partisipasi Perusahaan dalam menyampaikan atau melaporkan penerimaan tenaga kerja dan lowongan kerja yang tersedia
3. Kurangnya tenaga kerja fungsional instruktur.
4. Perubahan regulasi tentang tata cara perencanaan Kawasan transmigrasi (Permendes No.05 Tahun 2021)

2.3.2 Dampak Terhadap Pencapaian Visi, Misi kepala Daerah

Belum Optimalnya koordinasi dan pencapaian target program Bupati Kutai Kartanegara antara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah mengakibatkan tidak tercapainya target yang sudah ditentukan yaitu jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi dan jumlah tenaga kerja ditempatkan. Kekurangan SDM tenaga kerja fungsional instruktur ini bisa berdampak pada tidak tercapainya kinerja OPD seperti yang telah ditargetkan, sehingga pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan kerja menjadi tidak optimal. Disamping hal tersebut permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah belum sinerginya perencanaan dan pelaksanaan program-program sektoral untuk dapat fokus pada pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja, antara lain perluasan kesempatan kerja sektoral belum didukung tingkat kompetensi tenaga kerja yang tersedia mengingat kompetensi tenaga kerja yang tersedia belum sesuai kebutuhan di pasar kerja, serta tidak tercapainya target capaian program kukar siap kerja.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan pelayanan OPD

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan OPD yaitu fakta bahwa mayoritas angkatan kerja di kabupaten Kutai kartanegara memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah atau belum memiliki keahlian untuk memasuki pasar kerja, angkatan kerja di kabupaten Kutai kartanegara saat ini didominasi oleh pekerja yang kurang terampil atau low skill sehingga kurang dapat bersaing dengan pekerja diluar wilayah Kutai Kartanegara. Data Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kukar menunjukkan dari 371.349 orang angkatan kerja saat ini terdapat 356.298 orang yang bekerja, dari angkatan kerja tersebut sebanyak 15.051 orang yang mencari pekerjaan/pengangguran. Dari data tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus di selesaikan oleh OPD untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia demi pembangunan ketenagakerjaan yang baik. Tantangan lain dalam meningkatkan pelayanan OPD adalah masuknya Investasi di berbagai bidang di Ibu Kota Negara mengakibatkan



banyak pekerjaan baru muncul, dibarengi dengan persaingan berbagai pekerjaan yang akan mengubah kondisi sektor ketenagakerjaan secara signifikan.

Peluang-Peluang (opportunities) dalam pengembangan dan meningkatkan pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain sebagai berikut:

- a. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Terbukanya kesempatan bagi tenaga kerja yang ada di Kutai Kartanegara untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang akan menambah keterampilan dan skill tenaga kerja sesuai dengan pasar kerja dan melakukan pelatihan bersertifikasi guna memberikan kesempatan bagi pencari kerja dalam bersaing mendapatkan pekerjaan
- c. Akses informasi yang semakin cepat, tepat dan mudah

2.3.4 Rekomendasi

Rekomendasi untuk peluang kesempatan kerja yaitu memperbanyak pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat yang dapat menyerap tenaga kerja dan menciptakan wirausahawan baru di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan produktivitas serta daya saing pencari kerja. Untuk kegiatan pelatihan berbasis masyarakat yang dilanjutkan dengan pelatihan kewirausahaan, sehingga dapat berwirausaha mandiri. untuk dapat berwirausaha mandiri maka diperlukan modal usaha, karena itu bantuan permodalan paska pelatihan sangatlah diperlukan dalam upaya membina wirausaha mandiri, sehingga pada akhirnya menyerap tenaga kerja non formal.



2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Untuk meningkatkan kualitas SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mereview terhadap rancangan akhir dan hasil analisis kebutuhan pada program dan kegiatan tahun 2025, adapun rincian sebagai berikut :

Tabel 3 T-C.31
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,00	19.419.195.795	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,00	15.984.584.926	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	510.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	1.000.000.000	
1	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
2	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorl Daerah	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorl Daerah	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250.000.000	
3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	1 Berita Acara	-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	1 Berita Acara	50.000.000	



No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan Perangkat Daerah			Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan Perangkat Daerah			
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Distrans naker Kab. Kukar	jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	210.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Distrans naker Kab. Kukar	jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	45 Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	45 Dokumen	-	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	150.000.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	10.639.876.880	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	9.524.673.039	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 orang/bulan	10.489.876.880	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 orang/bulan	9.324.673.039	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	



No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	150.000.000	
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	1 Laporan	82.200.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	1 Laporan	105.000.000	
12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
13	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000	
14	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	82.200.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Aparatur Sipil Negara	124 orang	787.790.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Aparatur Sipil Negara	124 orang	505.000.000	
15	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	83 Orang	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	83 Orang	100.000.000	



No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Disiplin Pegawai		Disiplin Pegawai			Disiplin Pegawai	Kukar	Disiplin Pegawai			
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	140 Paket	237.790.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	140 Paket	-	
17	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000	
18	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	100.000.000	
19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang	50.000.000	
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	200.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	55.000.000	
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan	904.700.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan	529.700.000	
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.700.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.700.000	
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	



No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
27	Penyediaan Bahan/Material	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	25.000.000	
28	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000	
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000	
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	2 Unit	3.505.810.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	1 Unit	2.749.250.000	
30	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Distrans naker Kab. Kukar	umlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	2.149.250.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Distrans naker Kab. Kukar	umlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	2.149.250.000	
31	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	355.560.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	-	
32	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	15 Unit	1.001.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	15 Unit	600.000.000	



No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Disediakan			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Disediakan			
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.322.776.984	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.044.919.956	
33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000	
35	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	69.867.000	
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.868.776.984	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	671.052.956	
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang di pelihara	30 Unit	666.041.931	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang di pelihara	30 Unit	526.041.931	
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	276.041.931	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	276.041.931	



No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	90.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	-	
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distrans naker Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	26,27	10.952.340.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	26,27	7.153.540.000	
			Penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja KUKAR IDAMAN	3 Unit				Penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja KUKAR IDAMAN	3 Unit		
IX	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	300 orang	10.852.340.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	589 orang	7.053.540.000	
41	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	18 Kecamatan di Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	507 Orang	10.252.340.000	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	589 Orang	7.053.540.000	
42	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab. Kutai	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana	1 Unit	600.000.000	Pengadaan Sarana Pelatihan	Kec. Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana	1 Unit	-	



No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Kabupaten/Kota	Kartanegara	Pelatihan Kerja			Kerja Kabupaten/Kota	Bangun	Pelatihan Kerja			
X	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia	15 Lembaga	25.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia	15 Lembaga	25.000.000	
43	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kec. Muara Wis, Sebulu, Tenggarong, Tgr Seberang, Marang Kayu, Loa Kulu,	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	25.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	25.000.000	
XI	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang produktif	25 Perusahaan	25.000.000	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang produktif	25 Perusahaan	25.000.000	
44	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kec. Muara Wis, Teggarong, Tgr Seberang, sebulu, Muara Kaman, loa Kulu	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	25 Perusahaan	25.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	25 Perusahaan	25.000.000	
XII	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	25 Persen	50.000.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	25 Persen	50.000.000	
45	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
III	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Cakupan Layanan Data Informasi Tenaga Kerja Di Wilayah Kecamatan	100%	450.000.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Cakupan Layanan Data Informasi Tenaga Kerja Di Wilayah Kecamatan	100%	450.000.000	



No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
XIII	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	450.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	450.000.000	
46	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	300.000.000	
47	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro.	20 Orang	150.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro kabupaten/kota.	20 Orang	150.000.000	
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam/Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	12,35%	7.100.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam/Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	12,35%	5.300.000.000	
XIV	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan antar kerja	2 Layanan	6.750.000.000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Antar Kerja	2 Layanan	4.950.000.000	
48	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	60 Orang	300.000.000	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	60 Orang	300.000.000	
49	Pelayanan Antar Kerja	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50 Orang	100.000.000	Pelayanan Antar Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50 Orang	100.000.000	
50	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	200.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	200.000.000	
51	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	30 Orang	150.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	30 Orang	150.000.000	



No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
52	Perluasan Kesempatan Kerja	Kec. Sebulu, Muara Muntai Muara Wis, Loa Janan, Kota Bangun, Kembang Janggut, Tabang, Samboja, Tenggaro ng	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	600 Orang	6.000.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	671 Orang	4.200.000.000	
XV	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen	Dokumen	50.000.000	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	
53	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	10 Lembaga	50.000.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kec. Tenggaro ng	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	10 Lembaga	50.000.000	
XVI	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah informasi pasar kerja	1 Event	300.000.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah informasi pasar kerja	2 Event	300.000.000	
54	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	100 Orang	300.000.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	100 Orang	300.000.000	
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi	100%	11.386.704.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi	100%	11.386.704.000	



No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
XVI I	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan	28 Perusahaan	462.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan	28 Perusahaan	462.000.000	
55	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	25 Perusahaan	150.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	25 Perusahaan	150.000.000	
56	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Kec. Loa Janan, Sangasanga, Tgr Seberang, Muara Kaman, Anggana	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 Perusahaan	100.000.000	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 Perusahaan	100.000.000	
57	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kec. Tenggarong	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	212.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kec. Tenggarong	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	212.000.000	



No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
XVI II	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan	65 Perusahaan	10.924.704.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan	65 Perusahaan	10.924.704.000	
58	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Muara Kaman, Muara Muntai, Kembang Janggut, Sebulu, Tgr Seberang, Muara Jawa, Samboja, LoaJanan, Sanga-sanga,	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	200.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Muara Muntai, Loa Janan, Sebulu, Kembang Janggut, Muara Kaman, Samboja, Muara Jawa, Sanga Sanga, Tenggara Seberang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	200.000.000	
59	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100 Perkara	150.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100 Perkara	150.000.000	



No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
60	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Kec. Tenggarong	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6 Asosiasi	150.000.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Kec. Tenggarong	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6 Asosiasi	150.000.000	
61	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tenggarong	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	100.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tenggarong	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	100.000.000	
62	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	Distransnaker Kab. Kukar	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	48.729 Orang	10.324.704.000	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	Kab. Kutai Kartanegara	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	48.729 Orang	10.324.704.000	
VI	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Direncanakan	1 Kawasan	650.000.000	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Direncanakan	1 Kawasan	650.000.000	
XIX	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan	1 Dokumen	650.000.000	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan	1 Dokumen	650.000.000	
63	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	2 Dokumen	650.000.000	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Sumber Sari , Giri Agung , Mekar Jaya , Sidomukti , Manunggal Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	2 Dokumen	650.000.000	



No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
							, Bukit Pariaman, Buana Jaya, Mulawarman, Suka Maju				
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang dikembangkan	1 Kawasan	750.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang dikembangkan	1 Kawasan	750.000.000	
XX	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		Jumlah Rencana pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	1 Kawasan	750.000.000	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		Jumlah Rencana pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	1 Dokumen	750.000.000	
64	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	70 KK	450.000.000	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jonggon Desa, Margahayu, Panca Jaya, Bunga Jadi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	70 KK	450.000.000	
65	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	300.000.000	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Sidomukti, Cipari Makmur	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	300.000.000	
	JUMLAH				50.708.239.795	JUMLAH				41.674.828.926	



Pada tabel 3 tersebut Rancangan Akhir Program dan Kegiatan terdapat 8 (delapan) Program, 20 (dua puluh) Kegiatan dan 65 (enam puluh lima) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 50.708.239.795,-** Setelah dilakukan Analisis Kebutuhan Menjadi 60 (enam puluh) Sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 41.674.828.926** yang meningkat dari pagu awal RKPD, uraian penambahan Pagu anggaran sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Pagu anggaran program penunjang urusan pemerintah daerah sesuai Rancangan RKPD adalah sebesar Rp. 19.419.195.795,- kemudian sesuai hasil analisis kebutuhan menjadi Rp. 15.984.584.926,-. Perubahan penambahan pagu sebagaimana dimaksud adalah disebabkan beberapa hal sebagai berikut;

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang semula dengan pagu anggaran Rp. 510.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan diperlukan penambahan 3 Sub Kegiatan yaitu, Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD maka dilakukan penambahan anggaran menjadi Rp 1.000.000.000,-
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang semula pagu anggaran Rp. 10.639.876.880,- setelah dilakukan analisis kebutuhan mengalami penurunan menjadi Rp. 9.524.673.039,-, akan tetapi adanya penambahan 2 Sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang semula dengan pagu anggaran Rp. 82.200.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan memerlukan penambahan pagu anggaran menjadi Rp. 105.000.000,- Penambahan dimaksud untuk 2 Sub kegiatan baru yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebelumnya memiliki pagu sebesar Rp. 787.790.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp. 505.000.000,- penurunan disebabkan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pengalokasian anggaran dipindah ke Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, selain itu Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan mengalami pengurangan anggaran
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang semula pagu anggaran Rp. 904.700.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan memerlukan penambahan anggaran menjadi Rp. 529.700.000,- Pengurangan tersebut berasal dari Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki pagu sebesar Rp. 3.505.810.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp. 2.749.250.000,- pengurangan pagu disebabkan dihapusnya alokasi anggaran pada Sub Kegiatan Pengadaan



Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.322.776.984,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp. 1.004.919.956,- pengurangan pagu pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami penurunan pagu anggaran yang semula Rp. 666.041.931,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp. 526.041.931,-

2. Program Hubungan Industrial

Pagu Anggaran Program Hubungan Industrial sesuai Rancangan RKPD adalah sebesar Rp. 11.386.704.00,- kemudian sesuai hasil analisis kebutuhan menjadi, Rp. 11.386.704.000,-. Setelah dilakukan analisis kebutuhan Pagu Kegiatan tidak ada yang berkurang atau bertambah.

3. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Pagu anggaran Program Perencanaan Tenaga Kerja sesuai dengan Rancangan RKPD adalah sebesar Rp. 450.000.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan terjadi penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- Setelah dilakukan analisis kebutuhan Pagu Kegiatan tidak ada yang berkurang atau bertambah.

4. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pagu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sesuai Rancangan RKPD adalah sebesar Rp. 10.952.340.000,- setelah di analisis kebutuhan menjadi Rp. 7.153.540.000,- sesuai hasil analisis kebutuhan terdapat kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran pagu sebagaimana dimaksud adalah disebabkan bebrapa hal sebagai berikut;

- Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dengan Sub kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi yang semula Rp 10.852.340.000,- mengalami penurunan menjadi Rp. 7.053.540.000,- Penghapusan pagu anggaran terjadi pada sub kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

5. Program Penempatan Tenaga Kerja

Pagu anggaran Program Penempatan Tenaga Kerja sesuai Rancangan RKPD adalah sebesar Rp. 7.100.000.000,- sesuai hasil analisis kebutuhan berkurang menjadi Rp. 5.300.000.000,- perubahan anggaran pagu sebagaimana dimaksud adalah disebabkan bebrapa hal sebagai berikut;

- Pada Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota mengalami penurunan semula sebesar Rp. 6.750.000.000,- setelah dilaukan analisis kebutuhan menjadi Rp. 4.950.000.000,- Pengurangan anggaran pada sub kegiatan perluasan kesempatan kerja



6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Pada Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi sesuai Rancangan RKPD sebesar Rp. 650.000.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp. 650.000.000,- Setelah dilakukan analisis kebutuhan Pagu Kegiatan tidak ada yang berkurang atau bertambah.

7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi sesuai Rancangan RKPD sebesar Rp. 750.000.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp. 750.000.000,- Setelah dilakukan analisis kebutuhan Pagu Kegiatan tidak ada yang berkurang atau bertambah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini berdasarkan usulan masyarakat melalui Musrenbang kabupaten/kota serta mengakomodir usulan dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Distransnaker telah diakomodir dalam program kegiatan dalam Renja Distransnaker Kab. Kukar tahun 2024. Berdasar hasil telaah diatas, penentuan isu strategis didasarkan pada hasil telaah permasalahan pada lingkup tugas dan pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, telaah Visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara, telaahan renstra kementerian/lembaga dan Provinsi serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, maka disusunlah program dan kegiatan yang berkaitan kegiatan masyarakat sesuai dengan kamus usulan yang sudah disampaikan kepada pihak kecamatan dan desa untuk mempermudah dalam pengusulan program kegiatan yang sesuai dengan program kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025 dan selanjutnya di usulkan dalam selanjutnya di entri dalam aplikasi SIPD RI. Proses selanjutnya di Verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Selanjutnya dari hasil verifikasi Bappeda dalam Aplikasi SIPD Tugas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memverifikasi usulan masyarakat dalam SIPD sesuai dengan kamus usulan guna penentuan apakah usulan tersebut akan ditindak lanjuti atau di kembalikan kepada masyarakat.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung sesuai isu-isu strategis sesuai tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan di Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja; serta Peningkatan Kompetensi tenaga Kerja maka disusunlah program dan kegiatan yang berkaitan kegiatan masyarakat sebagaimana tabel berikut :



Tabel 4 T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	5	6	7	8
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	589 Orang	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		
1	Pelatihan Scaffolding	Kabupaten Kutai Kartanegara		40 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
2	Pelatihan Rigger	Kabupaten Kutai Kartanegara		40 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
3	Pelatihan Forklift	Kabupaten Kutai Kartanegara		20 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
4	Pelatihan Dasar Mekanik Alat Berat	Kabupaten Kutai Kartanegara		60 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
5	Pelatihan Operator Alat Berat	Kabupaten Kutai Kartanegara		80 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
6	Pelatihan Ahli K3 Umum	Kabupaten Kutai Kartanegara		40 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
7	Pelatihan Diksar Gada Pratama	Kabupaten Kutai Kartanegara		80 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
8	Pelatihan Welder 3G	Kabupaten Kutai Kartanegara		100 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
9	Pelatihan Servis Sepeda Motor	Kabupaten Kutai Kartanegara		30 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
10	Biaya Operasional (AP)	Kabupaten Kutai Kartanegara		9 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
11	Pelatihan Instrumen Level 1 (Pelatihan Digital Marketing " Dasar – dasar Teknik Digital Marketing dan Pengelolaan Sosial Media untuk menghadapi persaingan Dunia Kerja Tahap 1)	Kabupaten Kutai Kartanegara		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
12	Pelatihan Instrumen Level 1 (Pelatihan Digital Marketing " Dasar – dasar Teknik Digital Marketing dan Pengelolaan Sosial Media untuk menghadapi persaingan Dunia Kerja Tahap 2)	Kabupaten Kutai Kartanegara		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
13	Pelatihan Anggota Organisasi Kepemudaan dalam berwirausaha (Pelatihan security)	Kecamatan Muara Wis		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA



NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
14	Pelatihan Anggota Organisasi Kepemudaan dalam berwirausaha (Pelatihan security)	Kecamatan Kota Bangun Darat		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
15	Pelatihan Anggota Organisasi Kepemudaan dalam berwirausaha (Pelatihan security)	Kecamatan Kenohan		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
16	Pelatihan Anggota Organisasi Kepemudaan dalam berwirausaha (Pelatihan security)	Kecamatan Kembang Janggut		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
17	Pelatihan Anggota Organisasi Kepemudaan dalam berwirausaha (Pelatihan security)	Kecamatan Tabang		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM/LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA DALAM WILAYAH KABUPATEN	671 Orang	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Antar Kerja		
1	Pembekalan Tata Boga	Kabupaten Kutai Kartanegara		150 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
2	Pembekalan Tata Rias	Kabupaten Kutai Kartanegara		80 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
3	Pembekalan Menjahit	Kabupaten Kutai Kartanegara		30 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
4	Pembekalan Pertukangan	Kabupaten Kutai Kartanegara		20 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
5	Pembekalan Barber Shop	Kabupaten Kutai Kartanegara		60 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
6	Pembekalan Barista	Kabupaten Kutai Kartanegara		30 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
7	Pembekalan Bengkel Motor	Kabupaten Kutai Kartanegara		30 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
8	Pembekalan Servis Mesin Ces	Kabupaten Kutai Kartanegara		20 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
9	Pembekalan Bengkel Las	Kabupaten Kutai Kartanegara		20 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
10	Pembekalan Therapis	Kabupaten Kutai Kartanegara		20 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
11	Pembekalan Meubeul	Kabupaten Kutai Kartanegara		20 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
12	Pelatihan Pemuda untuk Berwirausaha (Wirausaha)	Kecamatan Muara Muntai		10 Orang	Mendukung Prodek



NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
	Perseorangan untuk Pemula) (Bantuan Mesin jahit) (kelompok Menjahit Barokah Bersama RT 009 Desa Muara Muntai Ulu)				KUKAR SIAP KERJA
13	Pembekalan Menjahit (Bantuan Mesin jahit dan pelatihan menjahit)	Kecamatan Kembang Janggut		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
14	Pelatihan Pemuda untuk Berwirausaha (Wirausaha Perseorangan untuk Pemula) (Pelatihan menjahit dan pengadaan mesin jahit) (semoga berkah)	Kecamatan Muara Muntai Ulu		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
15	Pelatihan Pemuda untuk Berwirausaha (Wirausaha Perseorangan untuk Pemula) (Bantuan alat jahit lengkap) (Mandiri R9)	Kecamatan Muara Muntai Ulu		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
16	Pelatihan Pemuda untuk Berwirausaha (Wirausaha Perseorangan untuk Pemula) (Bantuan mesin jahit lengkap) (Asmaul husna)	Kecamatan Muara Muntai Ulu		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
17	Pelatihan Pemuda untuk Berwirausaha (Wirausaha Perseorangan untuk Pemula) (Bantuan mesin jahit lengkap) (Dahlia)	Kecamatan Muara Muntai Ulu		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
18	Pelatihan Pemuda untuk Berwirausaha (Wirausaha Perseorangan untuk Pemula)(Bantuan Mesin jahit lengkap)(Anggrek bulan)	Kecamatan Muara Muntai Ulu		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
19	Bantuan Peralatan Mesin Menjahit Kelompok Wanita desa kahala hilir	Kahala Ilir		1 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 prioritas Nasional ke 4 (empat) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olah Raga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas. Serta Prioritas 6 (Enam) Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Selaras dengan kebijakan Pembangunan Nasional, Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari Kebijakan Nasional di bidang ketenagakerjaan diperjelas dan dipahami dengan baik oleh semua pihak terkait dengan adanya evaluasi terhadap kesesuaian tujuan dan sasaran dengan kondisi aktual di lapangan serta potensi dampak yang dapat dicapai. Serta menelaah strategi yang telah dirumuskan dalam Kebijakan Nasional dan menyesuaikannya dengan sumber daya yang tersedia serta kebutuhan yang ada di tingkat regional atau lokal.

Kebijakan Kementerian Tenaga Kerja
1. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas.
2. Meningkatkan perluasan Kesempatan Kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur dan Penempatan tenaga kerja bersifat inklusif
3. Meningkatkan pelayanan public Ketenagakerjaan dengan melaksanakan evaluasi terhadap Rencana Tenaga Kerja Daerah.
4. Menciptakan iklim Hubungan Industrial yang kondusif melalui mediasi dan peningkatan jaminan sosial ketenagakerjaan.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perekonomian melalui peningkatan pelaksanaan transmigrasi.

Secara eksplisit Kebijakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lepas dengan kewenangan yang ada yaitu pembenahan aspek Sumber Daya Manusia, berupa :

Urusan Ketenagakerjaan

- a. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi, berbasis kewirausahaan dan berbasis masyarakat
- b. Perluasan kesempatan kerja melalui padat karya
- c. Meningkatkan informasi lowongan kerja



- d. Optimalisasi kerjasama dengan perusahaan penerimaan tenaga kerja
- e. Optimalisasi informasi lowongan kerja dan tidak lanjut dari program yang telah dijalankan
- f. Meningkatkan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial
- g. Meningkatkan pelayanan kepersertaan jamsostek
- h. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis jumlah tenaga kerja yang mendapat fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.
- i. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan, dengan indicator kinerja sasaran strategis
 - Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
 - Menurunnya Perselisihan Hubungan Industrial (HI)
 - Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah
 - Meningkatnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi

Urusan Ketransmigrasian

- a. Telah dilaksanakanya penyempurnaan penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Kota Bangun, dan penyusunan rencana kawasan Kecamatan Tabang. Untuk RKT Kecamatan Kota Bangun menunggu hasil penilaian dari TIM Pusat untuk penetapan Rencana Kawasan Transmigrasi.
- b. Setelah adanya penetapan RKT dari Pemerintah Pusat akan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Satuan Kawasan Permukiman (RTSKP).

Program yang dilaksanakan untuk mendukung visi dan misi merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang telah ditetapkan Distransnaker Kab. Kukar adalah sebagai berikut :

No	Nama Program	Sumber Dana	Penanggung Jawab
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	APBD	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	APBD	Bidang Transmigrasi
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	APBD	
4.	Program Hubungan Industrial	APBD	
5.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	APBD	
6.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	APBD	
7.	Program Pengembangan Kawasan	APBD	



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Untuk mewujudkan Visi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kesempatan dan perluasan kerja bagi pencari kerja		Tingkat Kesempatan Kerja	95,06	95,35	95,6	95,75	95,90
		Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing,	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi	300 Orang (14,75)	300 Orang (18,59)	300 Orang (22,43)	300 Orang (26,27)	300 Orang (30,11)
		Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	6,41	8,39	10,37	12,35	14,33
		Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya partisipasi Pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.		Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di rencanakan	2	4	4	5	5
		Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di rencanakan	2	4	4	5	5
			Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di tetapkan	1	1	1	1	1
			Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di Bangun	0	0	0	1	2
			Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di Kembangkan	0	0	0	0	1



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas dan melayani		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	71,30	71,50	73,00	75,30	75,3
		Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	Predikat akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	71,30	71,50	73,00	75,30	75,3

Untuk mencapai Misi Dinas telah ditetapkan Indek Kinerja Utama (IKU) sebagai alat mengukur sekaligus pedoman dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketransmigrasian dengan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:

1. Tujuan :

Peningkatan kompetensi pencari kerja yang bersertifikat terlatih dan berdaya saing sesuai kebutuhan pasar kerja (Kukar siap Kerja).
dengan

Sasaran :

- Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
- Meningkatnya Pencari Kerja yang diterima di pasar kerja.
- Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis.

2. Tujuan :

Pengembangan kawasan partumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian.
dengan

Sasaran :

Meningkatkan penyediaan dan penataan kawasan desa/Kimtrans.

3. Tujuan :

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas dan melayani
dengan

Sasaran :

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan memperhatikan : Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dengan Visi : **“Mewujudkan Masyarakat kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”**, dan Misi ke-2 yaitu **Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya**, dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah **“PROGRAM KUKAR SIAP KERJA”**.

4.2 Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan kecamatan dijabarkan sebagaimana dalam tabel pencapaian, kajian usulan program/kegiatan dari masyarakat dan penggabungan Prioritas masukan masyarakat serta dengan Perubahan Renja OPD terdahulu.

Bertolak pada Visi, Misi Tujuan dan Program yang dilaksanakan RPJMD Tahun 2016-2021 secara rasional akan menyentuh segala aspek dalam sebuah sistem organisasi, baik aspek internal (Dinas) maupun aspek eksternal (Masyarakat). Seperti dijelaskan dalam Program diatas, aspek eksternal yang dimaksud adalah masyarakat itu sendiri sebagai subyek sekaligus obyek dari pelayanan yang diberikan.

Apabila aspek internal dapat dicapai maka aspek eksternal akan secara otomatis tercapai. Kita analogikan seperti pelayanan yang terjadi dalam perusahaan swasta maupun nasional, betapa petugas memberi layanan sangat bersahabat sekali sehingga penerima layanan merasa seperti raja, segala kebutuhan yang diinginkan penerima layanan dapat dengan cepat dan cermat dipenuhi oleh pemberi layanan.

4.3 Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025 terdiri atas 7 (Tujuh) Program dan 20 (Dua Puluh) Kegiatan, dan 60 (Enam



Puluh) Sub Kegiatan Pendukung pelaksanaan Sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai berikut :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sasaran Program : Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Pagu Anggaran : Rp. 15.984.584.926,-

Kegiatan :

a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pagu Anggaran : Rp. 1.000.000.000,-

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu Anggaran : Rp. 9.524.673.039,-

c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Pagu Anggaran : Rp. 105.000.000,-

d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Pagu Anggaran : Rp. 505.000.000,-

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Pagu Anggaran : Rp. 529.700.000,-

f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Pagu Anggaran : Rp. 600.000.000,-

g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pagu Anggaran : Rp. 1.044.919.9546,-

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pagu Anggaran : Rp. 526.041.931,-

- **Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Sasaran Program : Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing,

Pagu Anggaran : Rp. 7.153.540.000,-

Kegiatan :

a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.



Pagu Anggaran : Rp. 7.053.540.000,-

b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Pagu Anggaran : Rp. 25.000.000,-

c) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.

Pagu Anggaran : Rp. 25.000.000,-

d) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000,-

- **Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Sasaran Program : Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru.

Pagu Anggaran : Rp. 450.000.000,-

Kegiatan :

a) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Pagu Anggaran : Rp. 450.000.000,-

- **Program Penempatan Tenaga Kerja**

Sasaran Program : Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru.

Pagu Anggaran : Rp. 5.300.000.000,-

Kegiatan :

a) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu Anggaran : Rp. 4.950.000.000,-

b) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran ; Rp. 50.000.000,-

c) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

Pagu Anggaran : Rp. 300.000.000,-

- **Program Hubungan Industrial**

Sasaran Program : Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis

Pagu Anggaran : Rp. 11.386.704.000,-



Kegiatan :

- a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran : Rp. 462.000.000,-

- b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu Anggaran : Rp. 10.924.704.000,-

- **Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**

Sasaran Program : Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru

Pagu Anggaran : Rp. 650.000.000,-

Kegiatan :

- a) Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.

Pagu Anggaran : Rp. 650.000.000,-

- **Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**

Sasaran Program : Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru.

Pagu Anggaran : Rp. 750.000.000,-

Kegiatan :

- a) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian.

Pagu Anggaran : Rp. 750.000.000,-

Dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan publik dan peningkatan sumber daya aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dapat disusun Program dan Kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah, program urusan wajib dan program urusan pilihan seperti pada Tabel dibawah ini :



Tabel 5 T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
I				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		75,30	15.984.584.926			75,30	14.374.784.562
I				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 Dokumen	1.000.000.000			6 Dokumen	250.000.000
1				Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	-
2				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektori Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	1 Data	250.000.000	APBD		1 Data	-
3				Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	1 Berita Acara	50.000.000	APBD		1 Berita Acara	-
4				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	3 Dokumen	450.000.000	APBD		3 Dokumen	150.000.000
5				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Distransnaker Kab. Kukar	45 Dokumen	-	APBD		45 Dokumen	-



No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	-
7					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	2 Laporan	150.000.000	APBD		3 Laporan	100.000.000
II					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah		1 Laporan	9.524.673.039	APBD		1 Laporan	11.144.122.675
8					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Distransnaker Kab. Kukar	69 orang/bulan	9.324.673.039	APBD		83 orang/bulan	10.994.122.675
9					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	1 Laporan	25.000.000	APBD		1 Laporan	
10					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	1 Laporan	150.000.000	APBD		1 Laporan	150.000.000
11					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Distransnaker Kab. Kukar	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	
III					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan		1 Laporan	105.000.000	APBD		1 Laporan	75.000.000
12					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	-
13					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi	Distransnaker Kab. Kukar	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	-



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							
14		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	1 Laporan	30.000.000	APBD		1 Laporan	75.000.000
IV		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara		124 Orang	505.000.000			124 Orang	505.000.000
15		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Distransnaker Kab. Kukar	83 Orang	100.000.000	APBD		83 Orang	-
16		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Distransnaker Kab. Kukar	83 Orang	-	APBD		83 Orang	200.000.000
17		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Distransnaker Kab. Kukar	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	-
18		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Distransnaker Kab. Kukar	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	-
19		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Distransnaker Kab. Kukar	10 Orang	150.000.000	APBD		10 Orang	150.000.000
20		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Distransnaker Kab. Kukar	69 Orang	50.000.000	APBD		83 Orang	100.000.000
21		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Distransnaker Kab. Kukar	20 Orang	55.000.000	APBD		20 Orang	55.000.000
V		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		8 Layanan	529.700.000	APBD		8 Layanan	529.700.000
22		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	1 Paket	29.700.000	APBD		1 Paket	29.700.000



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
23		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	50.000.000
24		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	50.000.000
25		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	50.000.000
26		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	1 Paket	50.000.000	APBD		4 Paket	50.000.000
27		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	2 Paket	25.000.000	APBD		2 Paket	25.000.000
28		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Distransnaker Kab. Kukar	1 Laporan	25.000.000	APBD		1 Laporan	25.000.000
29		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	12 Laporan	250.000.000	APBD		12 Laporan	250.000.000
VI		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		2 Unit	2.749.250.000	APBD		2 Unit	300.000.000
30		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	6 Unit	2.149.250.000	APBD		6 Unit	-
31		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	3 Unit	-	APBD		3 Unit	-
32		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	15 Unit	600.000.000	APBD		15 Unit	300.000.000
VII		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	1.044.919.956	APBD		12 Bulan	1.044.919.956
33		Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan	Distransnaker	12 Laporan		APBD		12 Laporan	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Kab. Kukar		4.000.000				4.000.000
34		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	12 Laporan	300.000.000	APBD		12 Laporan	300.000.000
35		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	12 Laporan	69.867.000	APBD		12 Laporan	69.867.000
36		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	12 Laporan	671.052.956	APBD		12 Laporan	671.052.956
VIII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang di pelihara		30 Unit	526.041.931	APBD		30 Unit	526.041.931
37		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Distransnaker Kab. Kukar	21 Unit	276.041.931	APBD		24 Unit	276.041.931
38		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Distransnaker Kab. Kukar	3 Unit	-	APBD		3 Unit	-
39		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Distransnaker Kab. Kukar	1 Unit	-	APBD		1 Unit	100.000.000
40		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Distransnaker Kab. Kukar	1 Unit	150.000.000	APBD		1 Unit	150.000.000
41		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Distransnaker Kab. Kukar	2 unit	100.000.000	APBD		2 unit	-
II		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		26,27	7.153.540.000	APBD		30,11	6.276.000.000



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja KUKAR IDAMAN		3 Unit				3 Unit	
XI		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan		589 orang	7.053.540.000	APBD		300 orang	6.176.000.000
42		Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab. Kutai Kartanegara	589 Orang	7.053.540.000	APBD		300 orang	5.500.000.000
43		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kab. Kutai Kartanegara	20 Lembaga	-	APBD		20 Lembaga	50.000.000
44		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	-	APBD		1 Unit	626.000.000
X		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia		15 Lembaga	25.000.000	APBD		15 Lembaga	50.000.000
45		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Kutai Kartanegara	15 Lembaga	25.000.000	APBD		15 Lembaga	50.000.000
XI		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang produktif		25 Perusahaan	25.000.000			25 Perusahaan	50.000.000
46		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kab. Kutai Kartanegara	25 Perusahaan	25.000.000	APBD		25 Perusahaan	50.000.000
XII		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas		25 Persen	50.000.000			25 Persen	-
47		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	-



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			tingkat Daerah							
III		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan Layanan Data Informasi Tenaga Kerja Di Wilayah Kecamatan		100%	450.000.000	APBD		100%	100.000.000
XIII		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah		1 Dokumen	450.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
48		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	300.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
49		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro kabupaten/kota.	Kab. Kutai Kartanegara	20 Orang	150.000.000	APBD		20 Orang	-
IV		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam/Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten		12,35%	5.300.000.000	APBD		14,33%	1.854.000.000
XIV		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Antar Kerja		2 Layanan	4.950.000.000			2 Layanan	1.754.000.000
50		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	Kab. Kutai Kartanegara	60 Orang	300.000.000	APBD		30 Orang	75.000.000
51		Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Kutai Kartanegara	50 Orang	100.000.000	APBD		25 Orang	50.000.000
52		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	100 Orang	200.000.000	APBD		100 Orang	-
53		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Kab. Kutai Kartanegara	30 Orang	150.000.000	APBD		30 Orang	75.000.000
54		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	671 Orang	4.200.000.000	APBD		155 Orang	1.554.000.000



No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
XV					Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	50.000.000	APBD		Dokumen	-
55					Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Kec. Tenggarong	10 Lembaga	50.000.000	APBD		10 Lembaga	-
XVI					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja		1 Event	300.000.000	APBD		1 Event	100.000.000
56					Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	100 Orang	300.000.000	APBD		155 Orang	100.000.000
V					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi		100%	11.386.704.000	APBD		100%	400.000.000
XVII					Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan		28 Perusahaan	462.000.000			28 Perusahaan	200.000.000
57					Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Kutai Kartanegara	25 Perusahaan	150.000.000	APBD		20 Perusahaan	100.000.000
58					Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Kutai Kartanegara	25 Perusahaan	100.000.000	APBD		25 Perusahaan	-
59					Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kec. Tenggarong	2 Laporan	212.000.000	APBD		2 Laporan	100.000.000



No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
XVII I					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan		65 Perusahaan	10.924.704.000	APBD		65 Perusahaan	200.000.000
60					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Muara Muntai , Loa Janan , Sebulu , Kembang Janggut , Muara Kaman , Samboja , Muara Jawa , Sanga Sanga , Tenggarong Seberang	50 Perkara	200.000.000	APBD		15 Perkara	50.000.000
61					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kab. Kutai Kartanegara	100 Perkara	150.000.000			80 Perkara	50.000.000
62					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kec. Tenggarong	6 Asosiasi	150.000.000			6 Asosiasi	50.000.000
63					Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kec. Tenggarong	1 Lembaga	100.000.000	APBD		1 Lembaga	50.000.000
64					Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Kutai Kartanegara	48.729 Orang	10.324.704.000	APBD		35.440 Orang	-
VI					PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Direncanakan		1 Kawasan	650.000.000	APBD		1 Kawasan	300.000.000



No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
XIX					Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan		1 Dokumen	650.000.000			1 Dokumen	300.000.000
65					Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Sumber Sari , Giri Agung , Mekar Jaya , Sidomukti , Manunggal Jaya , Bukit Pariaman , Buana Jaya , Mulawarman , Suka Maju	2 Dokumen	650.000.000	APBD		2 Dokumen	-
66					Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Kawasan	-	APBD		1 Kawasan	100.000.000
67					Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen penyediaan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	100.000.000
68					Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	100.000.000
VII					PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang bangun		1 Kawasan	-			1 Kawasan	500.000.000
XX					Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya		1 Kawasan	-			1 Kawasan	500.000.000
69					Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	40 Laporan	-	APBD		40 Laporan	100.000.000
70					Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan	Kab. Kutai Kartanegara	50 Dokumen	-	APBD		50 Dokumen	200.000.000



No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Layak Berkembang)							
71					Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah penataan pemukiman disekitar Lokasi Kawasan	Kab. Kutai Kartanegara	200 KK	-	APBD		200 KK	200.000.000
VIII					PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang dikembangkan		1 Kawasan	750.000.000			1 Kawasan	150.000.000
XXI					Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Rencana pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans		1 Dokumen	750.000.000			1 Kawasan	150.000.000
72					Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Jonggon Desa , Margahayu , Panca Jaya , Bunga Jadi	70 KK	450.000.000	APBD		40 KK	150.000.000
73					Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Sidomukti , Cipari Makmur	2 Satuan Permukiman	300.000.000	APBD		2 Satuan Permukiman	-
JUMLAH									41.674.828.926				23.954.784.562

Berdasarkan tabel diatas hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, pagu anggaran yang dialokasikan untuk Program dan Kegiatan yaitu sebesar **Rp. 41.674.828.926,-** dan perkiraan maju rencana tahun 2026 sebesar **Rp. 23.954.784.562,-** (Sesuai RENSTRA-PD).



BAB V

P E N U T U P

5.1 Catatan Penting Pelaksanaan Program Kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah urusan tenaga kerja, yang mengacu pada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, dan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2025, merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang dalam program prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat tentang arah kebijakan, program kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dan pagu indikatif dan perkiraan maju tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil tersebut. Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi ditingkat Pelaksanaan sehingga target kinerja rencana strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana tetapi juga meliputi tahapan pengendalian Pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil Pelaksanaan rencana karena itu prosedur standar pengendalian Pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil Pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian Pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil Pelaksanaan rencana dan memudahkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk proving (membuktikan) kinerja dan untuk improving (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan Pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian program.

Selain itu perencanaan teknis Pelaksanaan tiap-tiap subkegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan Upaya



sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik dilingkungan pemerintah maupun diluar pemerintahan.

Evaluasi Pelaksanaan renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalisasi pencapaian target tahunan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, yang memuat program kegiatan untuk mencapai sasaran Pembangunan tahun 2025, didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas, yang mengacu pada kaidah-kaidah Pelaksanaan sebagai berikut ;

1. Rencana Kerja mengacu pada :
 - a. Program Pembangunan Nasional;
 - b. RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2026;
 - d. RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;
 - e. Hasil evaluasi Pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya;
 - f. Berdasarkan program kegiatan atau kamus usulan yang berasal dari Masyarakat.
2. Rencana Kerja memuat :
 - a. Sasaran dan indicator kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Program dan kegiatan;
 - c. Indikator kinerja;
 - d. Rencana tingkat capaian (target);
 - e. Pagu indikatif dan perkiraan maju.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, disusun untuk mendukung pencapaian indikator sasaran dalam Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, serta RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

5.3 Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Tindak Lanjut yang direkomendasikan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut :



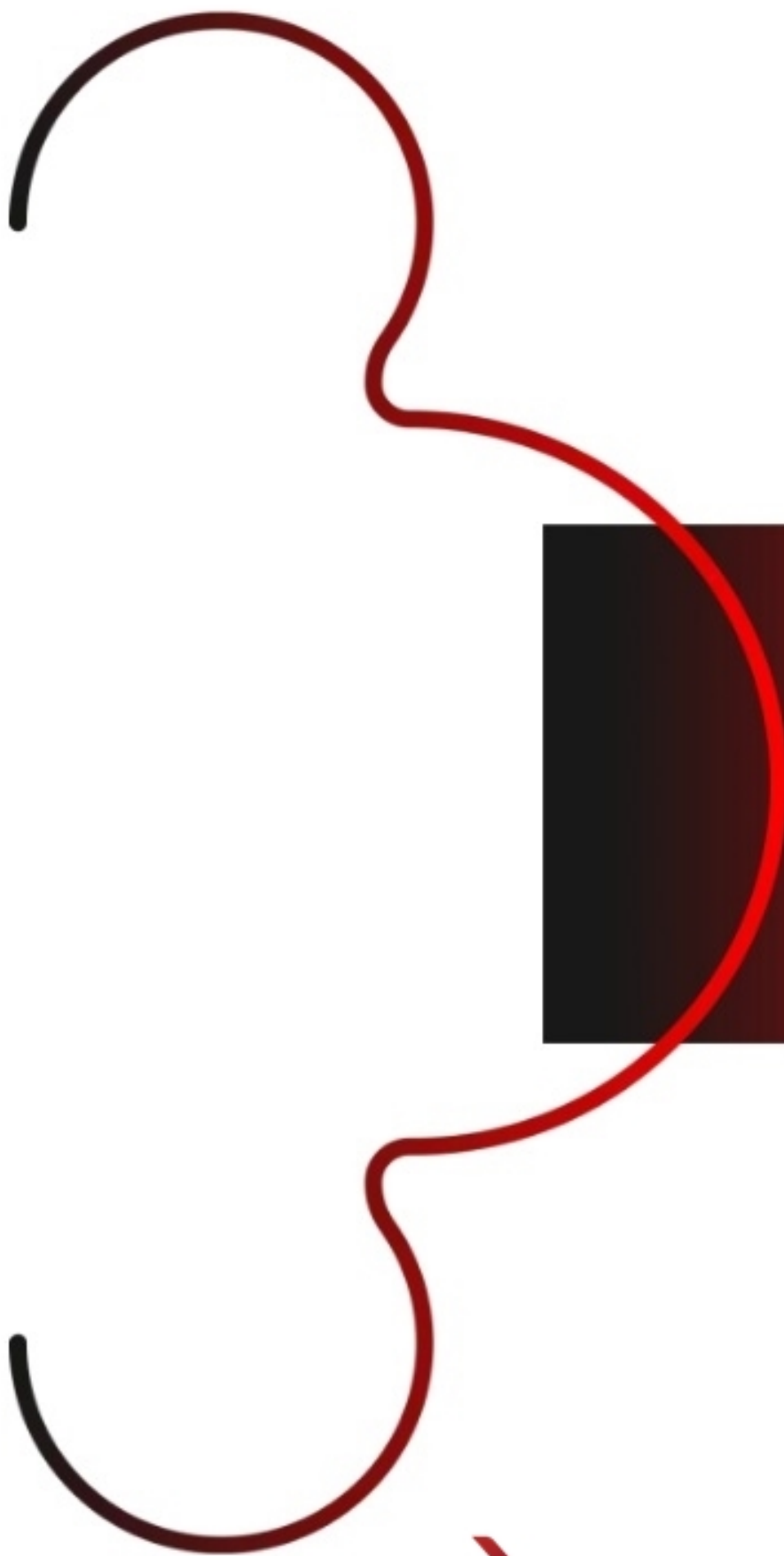
1. Penetapan prioritas Pembangunan urusan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian secara terkoordinir, terintegrasi, dan sinergi serta berkelanjutan;
2. Peningkatan partisipasi aktif Masyarakat/swasta dalam program Pembangunan urusan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian ;
3. Pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
4. Adanya Upaya peningkatan kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran urusan ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Tenggarong, Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas,





BerAKHLAK[>]
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa